

POTENSI KONFLIK DI DAERAH TUJUAN TRANSMIGRASI (KASUS SAMPIT DAN MESUJI)

Oleh:

I Made Sarmita

Jurusan Pendidikan Geografi, FIS, Undiksha

Abstrak

Program transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah sebagai salah satu program kebijakan kependudukan tidak selamanya membawa berkah bagi kaum transmigran. Dibalik potensi kehidupan yang lebih terjamin, dalam program ini juga menyimpan potensi konflik yang setiap saat bisa meletus. Artikel ini menguraikan potensi konflik di daerah tujuan transmigrasi disertai dengan beberapa kasus yang telah terjadi. Potensi terjadinya konflik di daerah transmigrasi sangat besar, terjadi karena tidak adanya kesesuaian budaya pendatang dengan budaya lokal, fanatisme kedaerahan, kecemburuan terhadap keberhasilan penduduk pendatang, dan perilaku penduduk pendatang yang menyinggung kebiasaan atau adat-istiadat penduduk lokal. Konflik juga terjadi disebabkan oleh faktor lingkungan utamanya berkaitan dengan teori ketamakan serta teori kemerosotan dan kelangkaan sumberdaya alam. Hasil studi empiris yang dipaparkan memperkuat teori yang sudah ada. Berbenturnya sifat-sifat negatif yang dimiliki masing-masing etnis menjadi akar konflik etnis Madura dengan etnis Sampit. Pada sisi lainnya teori ketamakan menjadi basis timbulnya konflik di Mesuji Lampung.

Kata Kunci : Transmigrasi, Potensi Konflik, Kasus Sampit, Kasus Mesuji

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia dibentuk dari keanekaragaman, baik budaya maupun fisik alamnya. Berbagai tradisi yang berasal dari peradaban kuno hadir dalam bangsa baru yang memiliki potensi tanpa bandingan. Hingga saat ini penduduk Indonesia yang sudah mendekati angka 250 juta jiwa, hampir 60% masih terpusat di Jawa yang luasnya hanya 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Meskipun program keluarga berencana menunjukkan keberhasilan, penduduk Pulau Jawa tetap bertambah dengan pesat. Berkat gunung berapinya, tanah Pulau Jawa menjadi subur dan merupakan salah satu daerah pertanian yang paling produktif di dunia. Selama berabad-abad para petani membudidayakan tanah yang subur itu. Sekarang ini, kepadatan penduduk sudah melebihi daya tampung pulau itu, sehingga tidak cukup pangan bagi penduduknya. Tanahnya menjadi terlalu sempit, hampir

setengah dari seluruh jumlah petani tidak memiliki lahan untuk menghidupi keluarganya.

Para petani tanpa lahan dan para penganggur berbondong-bondong pergi ke kota besar dengan harapan meningkatkan taraf hidupnya. Walaupun ribuan lapangan kerja diciptakan setiap tahun, sektor industri tidak mampu menyerap tenaga kerja yang bereksodus dari desa. Apalagi kesempatan kerja yang ada tidak sesuai dengan keterampilan para pendatang dari desa sehingga mereka terpuruk dalam kesengsaraan. Sebaliknya, pulau-pulau selain Jawa, Madura, Bali, dan Lombok (JAMBAL) jarang penduduknya dan sumber alamnya belum digarap secara maksimal. Pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya memiliki lahan yang sangat luas dan belum optimal dimanfaatkan, padahal lahan tersebut cukup menguntungkan bagi pertanian. Untuk memperbaiki ketimpangan tersebut, Indonesia telah meluncurkan program ambisius yakni program transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan lahan bagi mereka yang tidak memilikinya. Keikutsertaan dalam program tersebut bersifat sukarela. Para calon yang ingin mengikuti transmigrasi harus memenuhi beberapa persyaratan yang menyangkut umur kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, kesehatan fisik dan mental, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan pengalaman di bidang pertanian. Di daerah tujuan para transmigran memperoleh rumah dan lahan yang hasilnya dapat mereka nikmati sepenuhnya.

Dari berbagai segi, transmigrasi mirip penaklukan Amerika bagian barat pada abad ke-19. Sebagai unsur persatuan Amerika, para pionir mengubah lahan kosong menjadi salah satu daerah pertanian yang paling subur dan paling produktif di dunia. Dengan menawarkan lahan bagi mereka yang tidak memilikinya, Indonesia mengikuti tujuan yang sama yakni meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alamnya. Meskipun demikian, perbedaannya dengan Amerika Serikat adalah keterlibatan pemerintah Indonesia yang sangat banyak dalam program transmigrasi. Kehidupan perintis tidak mudah, sedikit demi sedikit berkat kerja keras, keluarga transmigran dapat berswasembada. Berkat pembinaan yang intensif, hasil produksi meningkat, kesehatan penduduk membaik, program keluarga berencana terlaksana, anak-anak bersekolah, dan wilayah yang baru dibuka berubah menjadi desa yang ramai. Setelah lima tahun di lokasi, transmigran

menerima sertifikat tanah. Apa yang dahulu kelihatannya mustahil untuk diperoleh, menjadi kenyataan dan merupakan awal kehidupan baru serta gerbang menuju impian yang lebih indah (Levang, 2003).

Dibalik keberhasilan yang diperoleh, ternyata program transmigrasi juga menyimpan potensi konflik yang beraneka ragam, baik antara para transmigran dengan penduduk lokal maupun antara transmigran dengan perusahaan swasta yang memiliki kepentingan pribadi dan dilindungi oleh negara. Hal ini menjadi problem yang sangat serius dan persoalannya menjadi begitu kusut dan kompleks. Kebijakan pembinaan transmigran yang sentralistik dan standar telah berimplikasi pada kuatnya budaya pendatang, sementara budaya lokal nyaris tidak berkembang. Akibatnya terjadi penegasian budaya setempat dan rusaknya perkembangan kultural masyarakat setempat. Pembinaan transmigrasi juga cenderung bias pendatang. Berbagai bantuan hanya diberikan kepada masyarakat di dalam Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), sementara penduduk sekitar yang tidak kalah miskin kurang memperoleh perhatian. Hal ini mengakibatkan perkembangan UPT lebih cepat dibanding desa-desa sekitar sehingga menimbulkan kecemburuan yang rentan terhadap konflik. Kebijakan perencanaan kawasan transmigrasi yang berciri sepihak, dengan kurang (tidak) melibatkan masyarakat sekitar telah berimplikasi pada sikap dan apatisme masyarakat lokal. Hal ini disebabkan salah satunya oleh sikap dan pandangan jajaran birokrat yang memposisikan diri sebagai penentu segalanya. Kebijakan ini berimplikasi pada munculnya lokasi-lokasi yang tidak memiliki keterkaitan fungsional dengan permukiman (desa) sekitar. Sementara itu, konflik antara transmigran dengan pihak swasta sering terjadi berkaitan dengan penyerobotan lahan, saling klaim kepemilikan lahan, dan lain sebagainya.

Konflik yang terjadi di daerah tujuan transmigrasi saat ini merupakan buah dari kebijakan masa lalu yang agak keliru. Kompas (14 Maret 2001) pernah menulis bahwa semasa Orde Baru, potensi konflik SARA tidak boleh kelihatan dan memang disembunyikan di balik karpas “Persatuan dan Kesatuan”. Bahkan kata SARA saja cukup ampuh untuk menyeret orang-orang ke penjara atas tuduhan subversi “memecah-belah”, mengancam persatuan bangsa”, mengganggu stabilitas nasional, dan sebagainya. Semua itu membuat Orde Baru dari luar tampak ibarat rumah yang kokoh, tetapi sebenarnya “rayap” bernama SARA itu terus

berkembang biak dengan subur dengan ketidakpuasan politik, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan, diskriminasi, kesewenang-wenangan, yang kemudian menggerogoti tiang-tiang penyangga, membuat rumah itu rapuh dan potensial untuk roboh. Kerapuhannya saat ini sudah terlihat semakin jelas, dengan semakin menggejalanya konflik-konflik SARA di daerah tujuan transmigrasi. Hal itu cukup menarik dibicarakan, sehingga artikel yang berjudul "Potensi Konflik Di Daerah Tujuan Transmigrasi (Kasus Sampit dan Mesuji)" diangkat kepermukaan. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam tulisan ini mengerucut pada kasus-kasus konflik yang dianggap cukup dahsyat (menimbulkan korban jiwa yang banyak) dan konflik terkini yang tidak terlepas dari kekeliruan kebijakan pemerintah. Namun sebelumnya, akan diuraikan terlebih dahulu secara ringkas mengenai sumber-sumber potensi konflik secara umum di daerah tujuan transmigrasi.

PEMBAHASAN

1. Potensi Konflik di Daerah Tujuan Transmigrasi

Meskipun Republik ini sudah berusia hampir 70 tahun, kenyataannya setiap provinsi apalagi daerah yang lebih kecil masih mempunyai karakteristik sosial budaya yang berbeda-beda. Perbedaan yang paling menonjol adalah antara daerah-daerah luar Pulau Jawa dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Karena perbedaan itulah, wajar kalau terjadi suatu sikap yang mempertahankan kebiasaan atau tradisinya masing-masing, padahal transmigrasi sudah dilaksanakan sejak Indonesia dalam penjajahan Kerajaan Belanda. Bahkan banyak daerah di Indonesia yang penduduknya sudah merupakan campuran dari generasi pendatang dan generasi setempat sehingga tidak mudah untuk mengukur mana yang dikatakan penduduk asli (Saefullah, 2002).

Kecenderungan terjadinya konflik antardaerah yang diakibatkan oleh perbedaan suku dan sosial budaya dikemukakan oleh Keban sebagai situasi kritis yang sangat potensial untuk menuju pada disintegrasi nasional. Bahkan dia mengingatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk memberikan prioritas terhadap lokasi-lokasi kritis yang menjadi tujuan transmigran dan memungkinkan atau telah mempunyai pengalaman terjadinya konflik karena perbedaan nilai-nilai budaya antara penduduk pendatang dengan penduduk setempat. Tentu saja, tidak dikehendaki apabila sampai terjadi kasus saling usir atau sampai ada kebijakan

penarikan dan penempatan pegawai daerah setempat berorientasi pada syarat kedaerahan yang bersifat diskriminatif (Keban,1996)

Sikap pendatang (dalam hal ini kaum transmigran) untuk mempertahankan kebudayaan aslinya sering diperlihatkan misalnya dalam upacara-upacara umum atau kegiatan yang mengundang banyak orang. Seperti ketika upacara perkawinan atau selamatan-selamatan keluarga dan bahkan dalam upacara pelantikan seorang pejabat. Dalam kehidupan yang berbaur di daerah transmigrasi yang merupakan kumpulan dari banyak orang dengan berbagai kebudayaan lokalnya, terdapat kecenderungan dalam sebagian kelompok masyarakat yang ingin memperkuat status sosialnya dengan mempergunakan media kebudayaan aslinya. Diperkuat lagi dengan adanya paguyuban-paguyuban atau perkumpulan-perkumpulan kedaerahan yang di satu sisi merupakan sarana silaturahmi atau reuni para transmigran dari daerah yang bersangkutan, tetapi di sisi lain lembaga tersebut berperan sebagai pemelihara budaya lokal dari pendatang. Para transmigran dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari kegiatan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di daerah asalnya.

Jika sikap menonjolkan kebudayaannya masing-masing hanya sampai pada kegiatan-kegiatan seremonial, mungkin tidak akan menimbulkan konflik sosial. Akan tetapi apabila sikap itu dipraktekkan dalam hubungan kerja atau solidaritas kedaerahan dalam lingkungan kerja, akan terjadi suatu situasi kerja yang walaupun secara tersembunyi bersifat konflik. Konflik yang dimaksud adalah konflik antara sikap mengutamakan hubungan kerja berdasarkan peraturan formal dengan sikap mengutamakan hubungan kerja berdasarkan persamaan etnis atau kebudayaan lokal. Bisa saja terjadi karena seorang yang menjadi pimpinan tertentu berasal dari suatu etnis, maka bawahannya yang diangkat adalah dari etnis yang sama. Manakala pimpinannya berubah, maka akan dilakukan perubahan pengangkatan bawahan yang etnisnya sama dengan pimpinan baru. Pada perusahaan swasta kecenderungan ini sering terjadi, terutama pada perusahaan-perusahaan milik pribadi.

Dengan kemajemukan budaya yang ada di Indonesia, potensi untuk terjadinya konflik karena situasi semacam itu cukup besar. Secara psikologis, hal itu dapat menyimpan konflik yang tersembunyi, yang pada suatu ketika apabila

terdapat kesempatan, konflik tersebut akan muncul ke permukaan. Hipotesis ini telah terbukti dengan beberapa kejadian yang dialami beberapa daerah yang penduduk di daerah-daerah tersebut sebagian adalah pendatang, yang kebetulan di antara mereka ada yang sukses dalam kehidupannya. Walaupun sudah bersatu dalam waktu yang cukup lama dan dalam pergaulannya setiap hari terlihat akrab, pada suatu ketika konflik itu akan muncul dan membahayakan. Salah satu alasannya adalah karena menyimpan bibit konflik berupa kecemburuan terhadap keberhasilan penduduk pendatang. Walaupun demikian, bisa juga terjadi kemungkinan karena perilaku penduduk pendatang yang menyinggung kebiasaan atau adat-istiadat penduduk lokal.

Pengalaman lapangan memberikan informasi bahwa hasil panen dari daerah pemukiman transmigran di beberapa tempat sulit untuk dipasarkan bukan karena kesulitan angkutan, tetapi juga karena ada sikap resistan dari masyarakat asli atau penduduk setempat. Pernah ada tuduhan bahwa transmigrasi di beberapa daerah di luar Pulau Jawa merupakan kebijakan yang bersifat “jawanisasi”. Secara praktis, tuduhan itu mungkin tidak terlalu salah, karena pada kehidupan awal keluarga-keluarga transmigran lebih banyak mempraktikkan kehidupan dengan karakter budaya aslinya sebelum dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan budaya setempat. Apalagi dengan terjadinya penempatan para transmigran pada lokasi-lokasi yang umumnya masih merupakan kawasan yang jauh dari kehidupan atau pergaulan dengan penduduk setempat (Saefullah,2002).

Potensi konflik yang terjadi utamanya di daerah tujuan transmigrasi juga tidak terlepas dari permasalahan lingkungan yang mungkin dieksploitasi secara berlebihan, yang menurut penduduk setempat akan mengganggu stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Artinya, konflik sosial atau konflik antar etnis di daerah transmigrasi sering didahului oleh problema lingkungan yang hingga saat ini sangat sulit ditemukan cara pemecahannya. Perselisihan mengenai lingkungan dapat menimbulkan konflik sosial tidak hanya berwujud perebutan akses sumberdaya alam, tetapi pada peradaban modern dapat berupa pencemaran air atau polusi atmosfer. Konflik lingkungan yang terjadi memiliki dimensi yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan antar sektor dan *stakeholders* pembangunan. Glasbergen (1995) menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan lingkungan

seringkali terjadi kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan hasil yang terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan bukan persoalan fisik, tetapi juga mencakup dimensi kepentingan subjek pelakunya (Baiquni dan Rijanta, tanpa tahun).

Sumber-sumber konflik yang sering muncul seperti di daerah transmigran tidak terlepas dari beberapa teori konflik utamanya adalah:

1. Teori ketamakan.

Kerakusan dan ketamakan merupakan salah satu sifat buruk manusia yang secara sengaja atau tidak dapat muncul dalam perilaku hubungan manusia dengan alam, maupun manusia dengan manusia lainnya. Konflik yang ditimbulkan dari penguasaan sumberdaya alam lebih dipicu oleh nafsu tamak dan rakus yang berakibat pada diskriminasi, ketidakadilan, dan marginalisasi kepentingan masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat dari kasus penguasaan sumberdaya hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diberikan pada para pengusaha pusat dan investor asing. Meskipun kebijakan hutan telah dapat menggerakkan ekonomi lokal dan bermanfaat meningkatkan devisa, tetapi pada saat bersamaan juga menimbulkan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan sekaligus marginalisasi kehidupan suku-suku masyarakat pedalaman yang hidup secara turun temurun mengelola hasil hutan. Keuntungan jelas telah dinikmati oleh para konglomerat dan pengusaha yang bekerjasama dalam mata rantai tersebut, tetapi kerugian jelas-jelas sangat dirasakan masyarakat setempat. Bahkan para pekerja pendatang seperti kaum transmigran yang semula turut menikmati tetesan ekonomi, akhirnya juga harus menanggung kerugian akibat munculnya konflik di tingkat bawah.

2. Teori kemerosotan dan kelangkaan.

Sekelompok orang akan berebut dan bahkan berkelahi atau berperang untuk mempertahankan serta mengamankan akses dan kontrol atas sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup; semakin langka sumberdaya, semakin dahsyat perebutannya. Kelangkaan berarti kesenjangan yang tidak dapat lagi ditoleransi atau diterima antara apa yang diinginkan dan apa yang dapat diraih. Kelangkaan menyebabkan orang atau

sekelompok orang mengalami kesulitan atau frustrasi, sehingga dapat memicu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau melanggar hak orang. Konflik sering muncul ketika terjadi penyerobotan dan pelanggaran yang tidak lagi dapat dikendalikan. Maka dalam situasi demikian perebutan dan konflik akan terjadi dalam memperebutkan sumberdaya yang terbatas. Sementara itu, kemerosotan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menganggap atau merasa yang lain lebih maju sedangkan seseorang atau sekelompok orang tadi berada dalam kondisi stagnan atau mengalami kemandekan. Banyak fenomena konflik yang terjadi diakibatkan oleh warga mayoritas yang rendah diri, dan warga minoritas yang tidak tahu diri (Baiquni dan Rijanta, tanpa tahun).

Dari apa yang dipaparkan di atas, cukup relevan dijadikan dasar untuk mengenali sekaligus memahami berbagai konflik yang telah terjadi di daerah tujuan transmigrasi akhir-akhir ini. Berikut akan disajikan berbagai kasus konflik antar etnis di daerah tujuan transmigrasi yang sumber permasalahannya tidak terlepas dari salah satu problema di atas.

2. Studi Empiris Konflik Suku Madura Vs Suku Dayak Di Sampit Kalimantan

Para transmigran etnis Madura yang bertransmigrasi ke wilayah Sampit berada pada hampir semua sektor kehidupan seperti sektor pertanian, perdagangan, transportasi, buruh bongkar muat di pelabuhan, kuli bangunan, penggergajian kayu, tenaga kasar pembuat jalan, pendulang emas, pekerja atau buruh dari yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan sebagainya. Terdapat pula beberapa penduduk etnis Madura yang berhasil, diantaranya ada yang memiliki usaha penyaluran BBM, hotel, pemborong bangunan, dan toko-toko yang besar. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Murdijanto, menemukan bahwa kondisi sosial ekonomi etnis Madura dengan etnis lainnya di Sampit relatif sama, sehingga tidak ada alasan yang menyatakan telah terjadi kecemburuan sosial antara etnis Dayak dengan etnis Madura (Murdijanto,2002).

Tercatat bahwa etnis Madura di kota Sampit adalah $\pm 32 \%$, dan etnis Dayak sebanyak $\pm 24 \%$. Tingkah laku dan perangai etnis Dayak tidak jauh berbeda

dengan etnis Jawa. Ada yang memeluk agama Islam, ada yang ber-“Islam abangan”, ada yang beragama Kristen, Katolik, dan ada pula yang percaya pada ilmu klenik atau hal-hal gaib. Menurut Asyikien (dalam Murdijanto, 2002), beberapa sifat kurang terpuji dari etnis Dayak adalah; fanatis dan mendewakan kesukuan, tidak mempunyai tenggang rasa dan pendengki etnis yang dimusuhi, menggeneralisasi kesalahan perorangan kepada etnis secara keseluruhan, melestarikan budaya mengayau, dan suka menyebarkan kebencian dan prasangka buruk. Sementara itu, etnis Madura umumnya bertemperamen keras dan kasar, arogan, mudah tersinggung, angkuh, dan ada yang menjadi preman. Sifat negatif lain dari etnis Madura adalah bercarok, serta pendendam yang biasanya berakhir dengan pembunuhan.

Dengan memperhatikan sifat-sifat tidak baik dari kedua etnis tersebut, maka diduga bahwa terjadinya konflik kedua etnis di Sampit ialah karena benturan sifat-sifat negatif tersebut. Terjadinya konflik karena disebabkan dendam yang tinggi dari etnis Dayak terhadap etnis Madura karena perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh sebagian kecil etnis Madura seperti mencuri, menjambret, menipu, menempati tanah orang lain tanpa izin, membuat keonaran dalam perjudian dan di kompleks pelacuran, melanggar lalu lintas, serta merampas milik etnis lain di pendulangan emas.

Sumber lain menyebutkan bahwa konflik yang terjadi antara kedua etnis ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan konstelasi kekuatan dan permasalahan lingkungan. Etnis Madura yang bertransmigrasi ke Sampit sebagai pekerja di HPH dan perkebunan, memiliki persepsi dan nilai yang berbeda dengan etnis Dayak dalam memperlakukan dan memanfaatkan hutan. Etnis Dayak memiliki kebudayaan hutan yang kuat, adat istiadat yang begitu dekat dengan alam dan menganggap hutan sebagai rumah dan sumber penghidupan yang lestari. Etnis Madura tidak banyak memiliki tradisi hutan, mengingat di daerah asalnya di Pulau Madura kondisinya relatif kering dan tandus. Mereka didatangkan untuk bekerja di perusahaan HPH yang tugasnya memotong pohon hutan dan sebagai tenaga kasar di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pada era orde baru, bisnis kehutanan tidak lepas dari peran aparat keamanan yang turut mengontrol konflik di lapangan. Ketika reformasi awal berlangsung,

peranan aparat keamanan agak mengendor, sehingga terjadi kekosongan kekuatan. Akibatnya pekerja etnis Madura langsung berhadapan dengan penduduk Dayak. Letupan konflik tidak terhindarkan, karena penduduk asli merasa lingkungan dan penghidupannya terganggu oleh kegiatan HPH. Kemarahan penduduk yang sudah lama marjinal dan tertindas, seperti meluap tanpa dapat dibendung menimbulkan akumulasi kekerasan yang mengerikan. Penduduk lokal Dayak yang telah lama marjinal merasa bahwa yang mereka lihat di lapangan merusak hutan adalah etnis pendatang Madura. Padahal pekerja etnis Madura sesungguhnya adalah buruh perusahaan besar yang menjadi mata rantai paling depan dari bisnis main kayu yang juga tereksploitir tenaganya. Sayangnya yang terjadi di lapangan adalah kekerasan antar penduduk yang sesungguhnya sama-sama menjadi korban dari sistem eksploitasi hutan yang tidak adil dan berkelanjutan (Baiquni dan Susilawardani, 2002).

Konflik antara kedua etnis tersebut sudah beberapa kali terjadi baik dalam skala kecil maupun skala besar. Konflik yang berskala besar sudah terjadi lima kali. Setiap kali terjadi konflik diakhiri dengan kesepakatan damai, tetapi muncul juga konflik lanjutan. Korban tragedi Sampit sangat memilukan dan tidak diperoleh data yang pasti. Diperkirakan etnis Madura yang tewas dipenggal kepalanya di kota Sampit saja adalah \pm 201 orang. Kejadian-kejadian di kota kecamatan dan kam-kam penggergajian kayu di pedalaman tidak didata dengan pasti. Semua rumah dan tempat usaha serta pondok pesantren etnis Madura dibakar. Akan tetapi anehnya, tempat-tempat ibadahnya yaitu masjid dan musola tetap utuh. Harta benda yang mereka miliki juga habis dan ludes terbakar seperti mobil, sepeda motor, sepeda, becak, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya.

Sebagian besar etnis Madura mengungsi dan diungsikan ke luar Sampit menuju Pulau Madura dan Surabaya, selanjutnya mereka pulang ke daerah asal seperti Probolinggo, Situbondo, Jember, dan Bondowoso. Ada yang menggunakan perahu tradisional milik mereka dan sebagian besar diangkut dengan kapal milik Angkatan Laut. Keakuratan data pengungsi ini pun masih diragukan. Yang mengungsi ke pulau Madura diperkirakan lebih dari 12.000 jiwa, dan tidak diketahui secara pasti yang kembali ke Gresik, Lamongan, Surabaya, dan Kabupaten lain (Murdijanto, 2002).

3. Studi Empiris Konflik Di Daerah Mesuji Lampung

Lampung merupakan daerah pertama yang dijadikan lokasi transmigrasi oleh pemerintah. Bahkan sebelumnya, ketika masih dijajah oleh Belanda, lokasi transmigrasi pertama yang dipilih juga adalah Lampung. Pada tahun 1905 Heitjing mengirimkan satu rombongan yang terdiri atas 155 kepala keluarga dari Keresidenan Kedu (Jawa Tengah) ke Gedong Tataan (Lampung) (Levang, 2003). Tidak mengherankan jika saat ini di Provinsi Lampung, kebanyakan dihuni oleh kaum transmigran. Segala aktivitas hingga konflik yang terjadi tidak sedikit bersentuhan dengan kaum transmigran, salah satunya adalah kasus Mesuji yang terjadi pada akhir tahun 2011.

Warga Mesuji baru saja mengungkap tragedi pembantaian petani di Mesuji yang dilakukan oleh aparat keamanan dan perusahaan perkebunan yang dipicu oleh sengketa lahan. Sengketa lahan di Kabupaten Mesuji terjadi di dua titik. Pertama, sengketa lahan antara perambah hutan di Desa Moro-moro, Pelita Jaya dan Pekat Raya dengan PT Silva Inhutani. Mereka memperebutkan lahan seluas 43.900 hektar di Kawasan Register 45. Kedua, sengketa lahan antara warga di Desa Kagungan Dalam, Nipah Kuning, Tanjungraya di Kecamatan Tanjung Raya dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo yang memperebutkan lahan tanah ulayat.

Mereka yang mengungkapkan tragedi pembantaian ini merupakan korban penertiban hutan yang telah dikuasai oleh PT Silva Inhutani sejak tahun 1996. Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan itu berakhir pada tahun 2024. Sebelumnya lahan seluas 43.900 hektar Kawasan Register 45 itu dikelola oleh PT Inhutani V hingga pertengahan tahun 1990-an. Perusahaan itu kemudian bergabung dengan PT Silva, anak usaha Sungai Budi Group, dan berganti menjadi nama PT Silva Inhutani. Belakangan, perusahaan gabungan itu murni dikelola oleh PT. Silva.

Pada tahun 1997, sejumlah warga mulai mendiami kawasan yang ditanam sengon dan tanaman industri lain peninggalan PT Inhutani V. Mereka menebangi tanaman yang ada di kawasan itu hingga gundul. Perambah yang kebanyakan kaum transmigran semakin marak berdatangan setelah tahun 1999. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Lampung Timur, Tulangbawang, Metro bahkan dari

Jawa Barat, Bali dan Makassar. “Tanah itu kemudian dikapling-kapling dan dibagi sesama mereka. Awalnya hanya mendirikan gubuk sebagai tempat melepas lelah se usai menanam singkong.

Saat masih masuk wilayah Kabupaten Tulangbawang, pemerintah dan aparat kerap menertibkan para perambah itu. Langkah itu tidak membuahkan hasil bahkan jumlah warga yang datang semakin banyak. Warga selalu berjanji akan pergi setelah singkong dipanen. Alasan itu selalu dipakai seperti pada pengusuran terakhir di Pelita Jaya. Para perambah itu kemudian mendirikan Desa Moro-moro yang terdiri dari Kampung Moro Seneng, Moro Dewe dan Moro-Moro. Mereka mendirikan ladang singkong, permukiman, delapan sekolah dasar dan tempat ibadah. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat aktif melakukan advokasi seperti Yabima dan Agra. Rata-rata warga di desa Moro-Moro menanam singkong. Setiap warga mengelola dua hingga dua puluh hektar lahan. Bahkan, ada yang menguasai lahan hingga seratus hektar. Kondisi itu membuat kawasan itu berkembang pesat. Gelombang selanjutnya pada tahun 2003, ratusan perambah kembali membuka lahan di Alpha 8. Mereka kemudian menyebut perkampungan itu dengan Pelita Jaya. Selanjutnya pada tahun 2009 warga kembali dikoordinir oleh Pekat Raya, sebuah organisasi massa. Warga yang hendak mendapat kapling harus membayar Rp 3 – 15 juta.

Keberadaan perambah yang perlahan menguasai kawasan Register 45 itu membuat Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Gabungan Penertiban Perlindungan Hutan. Anggota tim itu terdiri dari polisi, TNI, jaksa, pemerintah, satuan pengamanan perusahaan dan pengamanan swakarsa. Mereka melakukan aksinya pada bulan September 2010. Tim yang beranggotakan ribuan orang itu membongkar permukiman dan gubuk-gubuk liar yang dibangun Pekat Raya. Sempat ada perlawanan dari petani tetapi tidak ada korban jiwa. Penertiban yang digelar 6 November 2010 yang menyebabkan seorang warga, Made Asta, 38 tahun, tewas tertembak aparat. Sementara Nyoman Sumarje, 29 tahun, luka tembak di bagian kaki. Pasca peristiwa itu polisi menangkap sejumlah pengurus Pekat Raya karena telah mengkapling-kapling lahan Register 45 dan diperjualbelikan. Tim itu kembali mengusur warga di Simpang De, Kecamatan Mesuji Timur, 21 Pebruari 2011. Warga melawan dengan memblokir Jalan Lintas Timur Sumatera. Belasan

orang terluka terkena gas air mata termasuk anak-anak yang terjebak dalam bentrok itu.

Peristiwa itu membuat Tim Gabungan memberikan waktu kepada perambah hingga panen singkong usai. Hingga akhirnya, pada 14 Desember 2011, warga petani Pelita Jaya mengadukan nasibnya kepada Komisi III DPR RI soal adanya pembantaian. Dia mengaku heran dengan tudingan warga yang menyatakan perusahaan telah melanggar HAM. Dia justru menuding para perambah itu yang telah merampas dan menebangi pohon yang mereka tanam.

Sementara konflik lain terjadi di Areal Perkebunan PT Barat Selatan Makmur Investindo. Perusahaan itu terlibat sengketa dengan penduduk di Tanjungraya. Warga menganggap perusahaan telah menyerobot lahan milik mereka yang telah digarap turun temurun. Puncaknya pada 10 Nopember 2011. Warga yang hendak memanen sawit di lahan yang mereka klaim diberondong peluru aparat. Zailani, 45 tahun, warga Kagungan Dalam tewas di tempat, serta 4 orang lainnya terluka. Saat ini Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengadvokasi para korban sengketa lahan di desa Nipah Kuning, Kagungan Dalam dan Tanjung Raya. LBH menuding tragedi berdarah itu karena polisi lebih berpihak pada perusahaan (<http://masihangat.wordpress.com>).

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah sebagai salah satu program kebijakan kependudukan ternyata tidak akan selamanya membawa berkah bagi kaum transmigran. Dibalik potensi kehidupan yang lebih terjamin, ternyata dalam program ini juga menyimpan potensi konflik yang setiap saat bisa meletus. Potensi konflik di daerah transmigrasi akan terjadi jika tidak adanya kesesuaian budaya pendatang dengan budaya lokal, fanatisme kedaerahan, kecemburuan terhadap keberhasilan penduduk pendatang, perilaku penduduk pendatang yang menyinggung kebiasaan atau adat-istiadat penduduk lokal dan semuanya itu akan terus terjadi apabila keberagaman yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan secara positif. Konflik juga terjadi

disebabkan karena faktor lingkungan utamanya berkaitan dengan teori ketamakan serta teori kemerosotan dan kelangkaan sumberdaya alam.

Teori-teori yang dipaparkan sangat sesuai dengan hasil studi empiris mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu konflik. Konflik antara suku Madura dengan suku Dayak di Sampit terjadi karena benturan sifat negatif antar kedua suku, perilaku suku Madura yang dirasa menyinggung adat istiadat suku Dayak, serta permasalahan lingkungan yang di satu sisi suku Dayak sangat menghormati dan menjaga kelestarian hutan, sementara disisi lain suku Madura memiliki pandangan yang berseberangan. Keberagaman yang dimiliki kedua suku tidak dapat dimanfaatkan sehingga potensi konflik akan terus ada dan terjadi. Melihat kasus ini, migrasi dipandang sebagai penyebab dan akibat adanya konflik. Di Madura mereka merasa banyak kekurangan sehingga terdorong untuk melakukan transmigrasi ke Sampit yang dilihat sebagai daerah yang memberikan daya tarik yang tinggi. Mereka berpindah ke Sampit, namun sesampainya di sana, mereka berbeda kepentingan dengan suku Dayak sebagai suku asli di wilayah tersebut sehingga terjadi konflik. Dari hal tersebut suku Madura merasa terdesak dan memilih kembali ke daerah asalnya (*return migrant*). Studi empiris yang lain adalah terkait dengan kasus Mesuji di Provinsi Lampung, juga tidak lepas dari beberapa teori yang melatarbelakangi timbulnya konflik. Dalam kasus ini secara jelas terlihat sifat ketamakan yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertikai yakni masyarakat transmigran (setempat) atau pihak perusahaan yang memperebutkan lahan. Kedua belah pihak memiliki argumen masing-masing yang ingin memperkuat posisi mereka dan bersifat tamak, dan jika hal tersebut terus berlanjut, resolusi apapun yang ditawarkan, potensi konflik di masa mendatang akan terus terjadi. Memperhatikan kasus ini, migrasi dipandang hanya sebagai penyebab adanya konflik dan belum dilihat adanya data yang menunjukkan bahwa kasus ini menyebabkan eksodus para transmigran dari Mesuji kembali ke daerah asal.

Daftar Pustaka

Baiquni, M dan Rijanta.------. *Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Dalam Era Otonomi dan Transisi Masyarakat, pemahaman teoritis dan pemaknaan empiris.*-----

- Baiquni, M. dan Susilawardani. 2002. *Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta : ideAs dan TransMedia Global Wacana
- Glasbergen, Peter (ed). 1995. *Managing Environmental Disputes: Network Management As An Alternative*. The Netherlands : Kluwer Academic Publishers
- Keban, Yeremias T. 1996. *Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial Budaya (Dalam Aris Ananta, Chotib (eds) Mobilitas Penduduk Indonesia)*. Jakarta : LDFEUI dan BKKBN
- Levang, Patrice. 2003. *Ayo Ke Tanah Sabrang (Transmigrasi di Indonesia)*. Jakarta: KPG dan IRD Forum Jakarta Paris
- Purbangkoro, Murdijanto. 2002. *Migrasi Etnis Madura Ke Sampit Dan Konflik Yang Terjadi (Dalam Buku Mobilitas Penduduk Indonesia Tinjauan Lintas Disiplin)*. Yogyakarta : PSKK UGM
- Saefullah, Djadja. 2002. *Migrasi, Perubahan Sosial, dan Potensi Konflik (Dalam Buku Mobilitas Penduduk Indonesia Tinjauan Lintas Disiplin)*. Yogyakarta : PSKK UGM
- . *Inilah Kisah Konflik Lahan dan Pembantaian di Mesuji*. Tersedia dalam <http://masihangat.wordpress.com>, diakses pada tanggal 8 januari 2012